

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang masalah

Perkembangan tingkat globalisasi yang terjadi di dunia secara tidak langsung mengakibatkan setiap negara mengalami kemajuan dalam teknologi dan komunikasi sehingga akses antar negara menjadi semakin mudah. Perkembangan ini juga meliputi perkembangan dalam bidang ekonomi salah satunya terjadinya perdagangan internasional antar negara. Perdagangan internasional ini merupakan kegiatan tukar menukar barang maupun jasa dari dua negara untuk memenuhi kebutuhannya dengan alat dan sumber pembiayaanya berasal dari cadangan devisa. Jumlah cadangan devisa ini dipengaruhi oleh kegiatan ekspor dan impor suatu negara. Dalam rangka mempermudah akses perdagangan internasional, beberapa negara bergabung dalam suatu kebijakan yang didalamnya mendorong penghapusan hambatan dagang dan investasi. Selain itu, negara yang terlibat dalam kerjasama ini diyakini akan menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional ini. Salah satu contoh kebijakan atau kerjasama yang dilakukan Indonesia yaitu kebijakan *Belt and Road Initiative* dari negara China.

Kebijakan *Belt and Road Initiative* ini berawal dari masa pemerintahan Xi Jinping yang mempunyai keinginan untuk menghidupkan kembali kejayaan jalur sutra lama yang kemudian diperkenalkan kepada dunia internasional dengan mengusung dua konsep ekonomi yaitu *Silk Road Economic Belt* untuk jalur darat dan *The 21<sup>st</sup> Century Maritime Silk* untuk jalur laut. Kebijakan *Belt and Road Initiative* memiliki tujuan untuk membentuk kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia, Eropa, dan Afrika melalui sebuah pembangunan infrastruktur guna melancarkan arus perdagangan dari tiga benua tersebut. Selain itu juga, bertujuan untuk meningkatkan jaringan perdagangan dan investasi antara China dengan negara yang bergabung kebijakan *Belt and Road Initiative*. Dari hal tersebut negara di sepanjang jalur sutera modern ini dapat tercipta sebuah integrasi pasar yang akan berkoordinasi dan menyamaratakan kebijakan ekonomi agar terciptanya kerjasama yang lebih luas.

Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung dalam kebijakan *Belt and Road Initiative* yang dibuat China. Bergabungnya Indonesia dalam kebijakan ini diawali dari adanya

pidato dari Presiden Xi Jinping pada tahun 2013 di Kazakhtan dan Indonesia, dimana dalam penyampaian pidatonya menarik perhatian Presiden Indonesia Joko Widodo yang melihat program dari kebijakan *Belt and Road Initiative* ini sejalan dengan program Indonesia dalam membangun konektivitas ASEAN dan investasi (Kurniawan, 2016). Prospek jalur sutra ini juga mengarah pada perkembangan ekonomi Indonesia khususnya pada perdagangan internasional yaitu dalam sektor ekspor dan impor dimana dalam meningkatkan efektivitas perdagangan internasional, kebijakan *Belt and Road Initiative* ini mengusung beberapa poin yaitu:

1. Meningkatkan koneksi dalam dan infrastruktur dengan koridor transportasi yang besar;
2. Memperkuat komunikasi kebijakan yang dapat mendukung kerjasama dalam sektor ekonomi;
3. Memfasilitasi perdagangan yang ditekankan pada pengurangan dan penghapusan hambatan dagang dan investasi (*Trade Barriers*);
4. Hubungan *people-to-people*;
5. Meningkatkan kerjasama keuangan yang berfokus pada penyelesaian mata uang dalam hal mengurangi biaya transaksi dan resiko finansial.

Selain itu dalam kebijakan ini, China akan mendorong pengembangan kebijakan *Belt and Road Initiative* ini dengan menerapkan tarif konvensional terhadap beberapa produk dari negara anggota. Sehingga dari adanya penerapan terhadap tarif konvensional tersebut akan mengakibatkan penurunan tarif dari beberapa produk yang diperdagangkan oleh negara-negara tersebut seperti yang telah diterangkan oleh menteri perdagangan negara China (Xinhua News Agency, 2017). Dari beberapa poin diatas Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan dalam perkembangan perekonomian Indonesia khususnya dalam meningkatkan sektor perdagangan internasionalnya. Salah satu sektor yang mendorong perdagangan internasional Indonesia adalah pada industri tekstil dan produk tekstil. Tekstil sendiri merupakan sebuah barang yang memiliki bahan baku yang berasal dari serat (kapas, rayon, poliester) yang kemudian di pinal dengan benang dan menjadi bahan baku dari produk tekstil. Selanjutnya, produk tekstile merupakan hasil dari bahan tekstile tersebut yang dapat berupa pakaian jadi (garment), tekstil rumah tangga (*bed linen, curtain, toilet linen*, dan lain-lain) dan kebutuhan industri (canvas, tekstil rumah sakit, keperluan angkatan perang, dan lain-lain) (Firdaus, 2007).

Dalam pemenuhan bahan baku industri dan juga memenuhi selera masyarakat, Indonesia sendiri masih harus mengimpor bahan baku tekstil dari beberapa negara seperti India, Amerika Serikat, Brasil, dan Australia. Namun, bahan baku tekstil yang di impor dari beberapa negara tersebut memiliki harga yang sangat mahal seperti contohnya pada bahan baku tekstil dari India ini memiliki harga lebih mahal sekitar 20% dari harga tekstil lainnya. Selain itu, harga bahan baku seperti kapas dari Amerika sendiri mencapai US\$ 1,26 per pon. Dari mahalnya harga bahan baku dari negara tersebut, Indonesia kemudian menelisik kembali negara yang dapat menjadi pemasok bahan baku untuk mendorong berjalannya industri tekstil Indonesia yaitu dari China dengan melalui kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI). Dari kebijakan *Belt and Road Initiative* ini, China memberikan penawaran terhadap beberapa masalah yang dihadapi oleh Indonesia salah satunya pada pemenuhan bahan baku industri tekstil.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu **“Bagaimana pengaruh kebijakan *Belt and Road Initiative* terhadap impor tekstil Indonesia tahun 2016-2020 ?”**

## **C. Kerangka Berfikir**

### **1. Teori Hegemoni**

Titik awal dari hegemoni menurut Gramsci ini adalah adanya suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan kepada kelas-kelas dibawahnya dengan cara persuasif. Hegemoni juga bukan hubungan dominasi yang menggunakan kekerasan tetapi merupakan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Maka dari itu, hegemoni dalam pengertian Gramsci ini juga dapat diartikan sebagai sebuah organisasi konsensus dimana ketertundukan diperoleh melalui penguasaan ideologi dari kelas yang dihegemoni. Konsensus yang dimaksudkan oleh Gramsci adalah konsensus yang diciptakan atas dasar persetujuan. Dalam pembahasan hegemoni, Gramsci memberikan tiga batasan konseptualisasi yaitu terkait ekonomi, *political society* (masyarakat politik), dan *civil society* (masyarakat civil).

Hegemoni menurut Antonio Gramsci ini juga ditandai dengan adanya proses reproduksi makna dan praktik dari kelompok dominan kepada kelompok subordinat dari seluruh lapisan masyarakat yang kemudian menghadirkan suatu kepentingan dan tujuan

tertentu dari kelompok dominasi yang dilakukan dengan cara yang lebih condong kepada negosiasi antar kelompok. Hal ini dimaksudkan pada kerjasama dalam satu tujuan yang sama. Hegemoni yang terjadi dalam masyarakat ini umumnya akan menciptakan kesadaran yang palsu dari kelas yang terhegemoni maka dapat dikatakan hegemoni tersebut berjalan dengan lancar (Amanda, 2021). Konsep hegemoni juga dijelaskan oleh Gramsci melalui pernyataan sebagai berikut:

“The supremacy of a social group manifest itself in two ways, as ‘domination’ and as ‘intellectual and moral leadership’ A social group dominates antagonistic groups, which it tends to ‘liquidate’, or to subjugate perhaps even by armed force; it leads kindred and allied groups. A social group can, indeed must, already exercise ‘leadership’ before winning governmental power (this indeed is one of the principal conditions for the winning of such power); its subsequently becomes dominant when it exercises power, but even if it holds it firmly in its grasp, it must continue to ‘lead’ as well”

(Gramsci, Selection from the Prison Notebooks, 1999)

Dari pernyataan yang telah dijelaskan oleh Gramsci terkait hegemoni yang didalamnya terdapat supremasi kelas dengan dua konsep yaitu kepemimpinan secara langsung dan dominasi. Dari kedua konsep tersebut dapat mengimplikasikan tentang tiga hal yang pertama yaitu kekuasaan dan dominasi negara terhadap relasi maupu musuhnya. Kedua, tentang kekuasaan yang dijalankan untuk menaklukan pemerintahan dan yang terakhir yaitu kekuasaan suatu negara dijalankan melalui kepemimpinan dan dominasi yang terus berlanjut. Selain itu, pencapaian hegemoni dapat diperoleh dengan cara kepemimpinan moral dan intelektual dimana negara mempunyai kapasitas untuk mengelola dan bisa menjadi organisator sacara optimal sehingga dapat mengendalikan sesuai dengan keinginannya serta dapat memperoleh keuntungan dengan sangat maksimal (Gramsci, Selection From The Prison Notebooks, 1999).

Batasan konseptualisasi dalam menjelaskan hegemoni menurut Antonio Gramsci ada tiga yang pertama yaitu ekonomi. Konsep tersebut merupakan batasan yang digunakan dalam menjelaskan *made of production* atau cara produksi yang paling dominan terjadi di

sebuah masyarakat. Cara produksi ini terdiri dari hubungan sosial produksi antar kelas-kelas sosial dan sistem produksi. Kemudian, Masyarakat politik (*political society*) sebagai tempat berlangsungnya birokrasi negara dan praktek-praktek kekerasan negara. Menurut Gramsci, masyarakat politik ini merujuk pada hubungan koersif yang terjadi pada berbagai lembaga negara. Namun, aktifitas negara menurut Gramsci tidak hanya sekedar melakukan tindakan koersif tetapi dapat membangun konsensus melalui pendidikan dan kelembagaan. Terakhir yaitu masyarakat sipil (*civil society*) yang merujuk pada organisasi lain diluar negara dan di luar ekonomi dan sistem produksi material. Masyarakat sipil menurut Gramsci mencakup apa yang disebut organisasi-organisasi swasta (*private*) dimana kaum intelektual menjalankan tugasnya secara khusus (Harjito, 2009).

Dalam mencapai hegemoninya masyarakat sipil harus meraih kepemimpinan dalam bidang produksi seperti yang dilakukan kaum borjuis dengan melakukan kontrol yang ketat terhadap terhadap proses produksi sehingga mereka dapat menjadi kelas hegemoni dalam masyarakat. Pada pelaksanaan teori ini menurut Gramsci terdapat dua cara yaitu secara represif dan persuasif. Cara kekerasan dilakukan oleh kelompok yang memiliki kuasa untuk mendapatkan dominasi, sebaliknya cara persuasif dilakukan dengan cara konsensus dengan tujuan melanggengkan dominasinya tanpa ada perlawanan dan itulah yang disebut hegemoni.

China pada dewasa ini menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang dapat menandingi Amerika serikat dimana seperti yang diketahui bahwa selama ini Amerika serikat adalah pemilik kekuatan ekonomi terbesar di dunia. China juga merupakan salah satu negara di kawasan Asia yang memiliki tingkat perekonomian yang sangat baik dengan perkembangan teknologi dan informasinya. Dalam pandangan hegemoni menurut Gramsci ini, China mulai memperluas wilayah ekspansinya dari negara-negara yang dekat dengan China salah satunya Indonesia melalui Kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) ini. Melalui bergabungnya Indonesia dalam kebijakan tersebut Presiden Joko Widodo mulai memfokuskan pembangunan infrastruktur guna memperlancar arus perdagangan dengan bantuan dari China. Oleh karena itu, atas bantuan dari China kemudian presiden Joko Widodo mempersilahkan China untuk terlibat dalam segala proyeknya selain itu, China juga secara perlahan memasuki lapisan essensial Indonesia dimana pada sektor tersebut membutuhkan bantuan dari eksternal lebih banyak. Contohnya pada sektor tekstil

dimana pada perkembangannya sektor ini masih harus mengandalkan impor yang banyak terkait bahan baku dari negara lain yaitu China. Kemudian, China secara tidak langsung mengontrol cara produksi (*Made of Production*) Indonesia dengan cara memberikan kemudahan terkait impor bahan baku tekstil dengan beberapa poin pada kebijakan tersebut yang menekankan penghapusan hambatan dagang dan juga penerapan tarif konvensional untuk negara yang bergabung. Selanjutnya, dari segi kemudahan tersebut membuat Indonesia menjadi ketergantungan terhadap impor China. Sehingga dari adanya ketergantungan tersebut membuat Indonesia tidak bisa terlepas dari China terlebih lagi adanya hutang Indonesia terhadap China pada kebijakan tersebut. Hal ini menciptakan kesadaran palsu yang menganggap bahwa China sudah banyak membantu Indonesia maka Indonesia perlu membuka peluang yang besar bagi China.

Selain itu, China yang kemudian menjadi kelompok dominan di Indonesia juga memiliki tujuan tertentu dalam kerjasama dibawah *Belt and Road Initiative* ini dengan kemudian China memperluas penawaran komoditasnya yang dari bahan baku saja kemudian menjadi barang-barang yang sudah jadi seperti kain dan pakaian. Hal ini dilakukan China untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal setelah adanya hegemoni yang terjadi dalam masyarakat.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kerjasama Indonesia dengan China dalam Kebijakan *Belt and Road Initiative* terkait komoditas tekstil dan produk tekstil Indonesia. Di mana kebijakan ini juga mengukung program yang mengandung poin penting dalam pelaksanaannya yaitu dengan memfasilitasi perdagangan dengan penekanan pada hambatan dagang dan investasi antara Indonesia dengan China yang kemudian menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

#### **E. Hipotesis**

Dari kerangka berfikir yang telah dituliskan di atas muncul hipotesis bahwa :

1. Pengaruh dari kebijakan tersebut memberikan Indonesia kesempatan untuk mengimpor tekstil dengan harga yang lebih murah
2. Dari kebijakan *Belt and Road Initiative* menjadikan China lebih mudah untuk menguasai pasar tekstil di Indonesia

## **F. Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini kasus yang diangkat selama kebijakan *Belt and Road Initiative* ini mulai diberlakukan di Indonesia dengan nama yang baru yaitu pada tahun 2016-2020 dimana banyak kasus tentang kelesuan pada sektor tekstil dan produk tekstil Indonesia selama beberapa tahun tersebut yang mengakibatkan terjadinya lonjakan impor komoditas tekstil dan produk tekstil dari China di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terjadi secara sistematis, terstruktur terencana dan kemudian memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis (Semiawan, 2010). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana metode ini merupakan penelitian yang meneliti objek secara alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Pada metode penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data dapat berupa :

- 1) Observasi : melakukan pengamatan
- 2) Dokumentasi : barang-barang tertulis
- 3) Gabungan

Data dari penelitian dengan metode kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan tidak berupa angka. Data dan informasi terkait dengan penelitian ini diperoleh dari data primer dan juga data sekunder dimana pada data primer diperoleh dari buku dan teks yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan pada data sekunder diperoleh dari surat kabar, majalah, jurnal, situs-situs internet, dan lainnya. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melalui dokumentasi dengan data sekunder berupa sumber-sumber yang diperoleh dari jurnal, buku, website, artikel, dan sumber lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini dan dapat diuji kebenarannya (Abdussamad, 2021).

## **H. Sistematika Penulisan**

**Bab I**, Menjelaskan mengenai latar belakang masalah kasus yang akan dibahas, rumusan masalah, kerangka berfikir, tujuan penelitian, hipotesis, batasan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II**, Menjelaskan tentang sketsa hubungan kerjasama antara Indonesia dengan China dalam kebijakan *Belt and Road Initiative*.

**Bab III**, Membahas mengenai data produksi antara Indonesia dan China sebelum dan sesudah bergabung dengan kebijakan *Belt and Road Initiative*.

**Bab IV**, Menjelaskan tentang dampak kebijakan *Belt and Road Initiative* terhadap produksi tekstil Indonesia tahun 2016-2020.

**Bab V**, Membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan tulisan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya beserta lampiran dan daftar pustaka.